

PRABOWO DAN PAKAR GOBLOK

Judul asli: PRABOWO "PAKAR GOBLOK" DAN TG.ZAINUDDIN ABDUL MAJID.

Oleh: H. Ali Bin Dachlan

Tanggal 22 September 2026

Presiden Prabowo, ketika berpidato dihadapan acara hari ulang tahun (HUT) Partai PAN di Jakarta pada Jumat 18 September lalu, menyampaikan keluhannya terhadap sejumlah pakar di Indonesia. Pakar, pakar menfitnah, saking pakarnya menjadi goblok. Menurut Prabowo, seorang pakar seharusnya juga berpikir tentang bangsanya, bagaimana caranya agar bangsa ini maju. Pakar yang hanya bisa mengeritik sejatinya tidak dibutuhkan.

Mendengar pidato dengan nada keras tersebut, tepuk tangan meriah terdengar menggema di ruang acara gedung Convention Centre di Jakarta. Tentu saja mereka yang bertepuk penuh semangat adalah para hulu balang, para jongos dan khadam. Di mana para pakar? Tentu saja terdiam membisu sambil menggerutu didalam benaknya. Sebuah gerutuan sia sia, karena tidak ada pihak lain yang dapat mendengarnya, kecuali dari wajah para pakar yang penuh kecewa dan gusar.

Pada Januari 2026 lalu, sebanyak 1200 pakar, para rektor, para dekan dari berbagai Universitas berkumpul di istana. Rupanya para pakar tersebut hanya diundang untuk mendengarkan berbagai pemikiran dari presiden. Tidak terdengar dialog, tidak terdengar pikiran bernas dari para pakar, mungkin presiden melihat kepakaran mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sebanyak 1200 orang para pakar pulang dari pertemuan seperti anak sekolah biasa, pulang setelah jam belajar selesai.

Sebenarnya seorang pakar akan menyampaikan buah pikirannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara teori dan praktik. Sementara pakar-pakar kita kebanyakan sebagai "pakar membaca buku" saja. Pakar, sejatinya harus berbicara dengan jujur, pakar menyingkirkan nilai-nilai selain nilai keilmuan. Jika seorang yang disebut pakar tidak becus sampaikan pendapatnya, karena perhitungan untung dan rugi, maka kepakarannya patut diragukan. Mungkin itulah yang dimaksud Prabowo sebagai pakar goblok. Kritiknya bernuansa fitnah, setelah diberi umpan, seketika berubah menjadi penjilat.

Sebenarnya kritik sangat dibutuhkan oleh negara maju. Kritik yang juiur dengan kepakaran yang terukur dan teruji amat dibutuhkan. Mereka yang anti kritik adalah orang goblok

“Teladan” KH Sahal Mahfuz

Hanya sehari setelah pidato Prabowo di HUT PAN pada tanggal 18 September 2026, perayaan 100 tahun Pondok Pesantren Moderen Gontor pun diselenggarakan yaitu pada tanggal 19 September 2026. Salah satu tamu Negara yang hadir adalah Presiden Prabowo. Duduk di posisi paling depan di kolom tengah bersama para undangan lainnya.

Seakan waktu dan ruang sudah ditakdirkan. Kemarin di HUT PAN Pak Prabowo begitu keras merespon para pakar yang mengertiknya. Kini harus mendengarkan bagaimana KH. Sahal Mahfuz merespon kritik atau protes. Potongan pidato KH. Sahal yang kemudian viral di media social: “Jika rumah saya, pakaian saya, kendaraan saya, makanan saya dan lainnya melebihi para santri maka boleh protes, boleh demo....”.

Pidato yang mengalir deras dari KH Sahal seakan memberi energy baru bagi masyarakat dan para pakar yang sehari sebelumnya dilibas oleh Presiden Prabowo. Bayangkan pidato yang begitu panas dan keras sebagai respon kepada para pengkritik dan pakar lalu seakan mengalami titik klimaks dengan adanya “perlawanan” dari KH Sahal. Masyarakat dan para pengeritik dan pakar yang tadinya sudah “putus asa/ putus harapan” bagaimana hendak “menyadarakan” Pak Presiden, bagaimana hendak “memperingati” Pak Prabowo atas berbagai keadaan yang sedang membelit bangsa dan negara, kini mendapatkan angin segar kembali.

Lihat saja bagaimana kemudian potongan pidato KH Sahal begitu banyak yang share dan hampir semuanya viral. Potongan pidato cari muka merupakan potongan yang juga viral. Pada potongan ini, KH Sahal mengatakan kurang lebih “orang yang tidak punya muka mencari muka, orang tidak punya uang mencari uang, orang tidak punya ijazah mencari ijazah”....Jika dianalisa

lebih jauh, nampak pidato KH Sahal mengalir alami tetapi sebenarnya isinya menghantam kekuasaan dan jaringannya yang cenderung tidak peduli pada masukan dan kritik berbagai lapisan masyarakat selama ini.

IT dan Kekuasaan

Di zaman IT yang sudah sangat canggih, semua informasi hampir tidak terkecualikan masuk ke ruang-ruang privasi masyarakat dengan sangat mudah. 24 jam informasi dapat diakses. Ketika ruang media seperti ruang tidak terbatas yang sangat luas bagi siapa pun, maka tidak ada yang dapat menghalangi masyarakat menjadi actor dan menjadi penonton.

Konten-konten yang menyindir kekuasaan yang digawangi oleh Presiden Prabowo seakan jebol berkali-kali. Dengan konten halus bahkan sampai yang menghina semua ada di media social terkait bagaimana Presiden dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat banyak. MBG yang bermasalah dengan adanya keracunan ribuan siswa dianggap sebagai peristiwa biasa-biasa saja. Pelanggaran status quo dipemerintahan di mana Menteri yang dinilai tegas berpihak ke rakyat di copot tidak dengan hormat. Sementara Menteri yang kinerjanya tidak maksimal bahkan cenderung bermasalah didiamkan, juga ikut menjadi focus konten-konten yang memprotes kinerja Presiden Prabowo.

Hal demikian setidaknya sudah sampai kepada Pak Presiden. Sebagai respon ketidak siapannya untuk tidak bisa menerima semua sindiran yang menyerang, makanya bisa jadi Presiden merasa geram. Lalu meledak di Pidato HUT partai PAN. Bagaimana pun menurutnya semua kebijakannya sudah benar, sudah *on the track*. Justru yang tidak dianggapnya benar adalah masyarakat yang mengkritik.

Padahal pada posisi normal sebagai person, sudah dipastikan manusia itu mempunyai kemampuan relative. Satu kebijakan misalnya sudah pasti ada kelemahannya. Dengan demikian

tidak ada satu pun kebijakan yang tidak boleh anti kritik, karena memang dibuat oleh manusia. Selama kebijakan dikeluarkan oleh manusia, maka selama itu ada peluang untuk dikritik, namun alih-alih mau menerima kritik dan atau saran malah Pak Prabowo bersikukuh menggoblok-goblokkan pengkritiknya. Siapa yang waras di sini?

Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semua sudah memaklumi bahwa para penyelenggara negara harus dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Semua Presiden termasuk Pak Prabowo tidak mungkin mengangkat seseorang untuk sebagai pembantunya dalam penyelenggaraan Negara tanpa adanya kompetensi yang mendasarinya. Sama dengan orang yang dikatakan pakar, ahli, pemerhati maupun masyarakat mengeritik berdasarkan kemampuannya di bidang itu. Bahkan sekolah dibuka sampai S3 dalam rangka untuk membangun sumber daya manusia yang ahli dibidangnya masing-masing. Lalu ketika mereka mencurahkan perhatiannya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, Presidennya tidak percaya terhadap para pakar. Justru dikatakan goblok.

Di sisi lain komunikasi seorang pemimpin tertinggi harus mencerminkan komunikasi yang pantas. Seorang presiden tentu bahasanya tidak sama dengan bahasa preman pasar. Kata goblok tidak hanya kasar tetapi tidak pantas untuk diucapkan oleh sekelas Presiden. Bagaimana pun seorang Presiden menjadi rujukan masyarakat yang dipimpinnya. Banyak sisi yang dapat dilihat oleh masyarakat termasuk cara Presidennya berkomunikasi atau berkata-kata. Dengan demikian seyogyanya seorang Presiden tidak sembarangan berkata-kata dengan perkataan selevel preman pasar. Bagaimana pun nanti masyarakat bisa menjadikan perkataan kasar itu sebagai konten untuk “menyerang” balik Presiden sampai viral.

Belum lagi kata-kata kasar seperti goblok, ndasmu ditiru oleh masyarakat terutama anak-anak. Bagaimana kemudian harus mendidik mereka sementara orang yang berada di pucuk tertinggi kekuasaan saja berkata semaunya. Semoga Pak Presiden berhenti mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata sumpah serapah ke depannya.

